

**PENGARUH PENGENDALIAN TERHADAP  
KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI WILAYAH  
KERJA UNIT PELAYANAN TEKNIS DINAS PUSKESMAS  
BANJARAN KABUPATEN BANDUNG**

***EFFECT OF CONTROL ON QUALITY OF BASIC HEALTH SERVICES  
IN WORK AREAS OF TECHNICAL SERVICES UNIT DINAS  
PUSKESMAS BANJARAN DISTRICT, BANDUNG***

**Dicky Riswara Sutera<sup>1</sup>, Wiwin Winangsih<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Langlangbuana

<sup>2</sup>winangsih2017@gmail.com

---

**ABSTRAK**

Masalah dalam penelitian ini adalah Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar di Pusat kesehatan Masyarakat Banjaran Kota Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti merumuskannya sebagai berikut “Seberapa besar Pengaruh Pengendalian Terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar di Pusat kesehatan masyarakat Banjaran Kota Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung”.

Untuk menganalisis masalah yang diteliti, peneliti mengajukan teori pengendalian dari Anthony dan Govindarajan, berdasarkan proses-proses pengendalian yaitu, pelacak (*detector*), penilai (*assessor*), dan umpan balik (*effector*). Sedangkan teori kualitas pelayanan digunakan dari Fitzsimmons dalam Sedarmayanti berdasarkan lima dimensi yaitu, *tangible* (berwujud), *reliability* (keandalan), *responsiveness* (tanggung jawab), *assurance* (jaminan), dan *emphaty* (perhatian). Metode penelitian yang digunakan adalah metode Deskriptif Analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan kesehatan dasar di Pusat kesehatan masyarakat Banjaran Kota Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung. Hasil ini dibuktikan dengan variabel pengaruh pengendalian oleh Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Banjaran Kota Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung berdasarkan proses-proses pengendalian secara keseluruhan berada pada kondisi “cukup baik”. Demikian juga kualitas pelayanan kesehatan dasar Pusat Kesehatan Masyarakat Banjaran Kota Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung secara keseluruhan berada pada kondisi “cukup baik”.

**Kata Kunci:** Pengendalian, Kualitas Pelayanan dan Kesehatan Dasar

**ABSTRACT**

*The problem in this study is the Quality of Basic Health Services at the Banjaran City Community Health Center, Banjaran District, Bandung Regency. Based on these problems, the researcher formulated it as follows "How big is the Influence of Control on the Quality of Basic Health Services in the Banjaran City Public Health Center Banjaran District, Bandung Regency".*

*To analyze the problem under study, researchers propose a control theory from Anthony and Govindarajan, based on control processes, namely, a tracker, a assessor, and*

*an effector. While the theory of service quality is used from Fitzsimmons in Sedarmayanti based on five dimensions namely, tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. The research method used is Descriptive Analysis method.*

*The results showed that control had a positive and significant effect on the quality of basic health services in the Banjaran City Public Health Center, Banjaran District, Bandung Regency. This result is evidenced by the variable influence of control by the Head of the Banjaran City Community Health Center Banjaran District, Bandung Regency based on the overall control processes in the condition of "good enough". Likewise the quality of the basic health services of the Banjaran City Community Health Center Banjaran District, Bandung Regency as a whole are in a "fairly good" condition.*

**Keywords:** *Control, Quality of Service and Basic Health*

## 1. PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit dengan sasaran utamanya adalah masyarakat. Karena menyangkut kepentingan masyarakat banyak, maka peranan pemerintah dalam pelayanan kesehatan masyarakat mempunyai bagian atau porsi yang besar. Namun akibat keterbatasan sumber daya pemerintah, maka potensi masyarakat perlu digali atau diikutsertakan dalam upaya pelayanan kesehatan masyarakat.

Pembangunan Kesehatan Masyarakat di tingkat Kabupaten Bandung dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit pelaksana teknisnya. Sesuai dengan kedudukannya Pusat Kesehatan Masyarakat diberikan peran sebagai Pusat Pembangunan Kesehatan Masyarakat di satu wilayah kerja dengan melaksanakan sebahagian tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas Pusat Kesehatan Masyarakat berfungsi dalam pemberdayaan masyarakat, penggerakan masyarakat, mendorong pembangunan berwawasan kesehatan, Memantau masalah kesehatan masyarakat

dan memberikan pelayanan kesehatan dasar. Apabila memperhatikan peran, tugas dan fungsi Pusat Kesehatan Masyarakat sudah seharusnya Pusat Kesehatan Masyarakat mendapatkan perhatian khusus dalam pembangunan ketahanan nasional bidang kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung merupakan Dinas Otonomi Daerah yang secara struktur sepenuhnya berada dalam kewenangan Pemerintah Daerah, sedangkan hubungan dengan Dinas Kesehatan Propinsi adalah merupakan hubungan kerja fungsional, sehingga tugas-tugas bantuan (dekonsentrasi) dibidang kesehatan ditingkat Kabupaten dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hasil observasi awal memperlihatkan data mengenai kualitas pelayanan kesehatan dasar di Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung tahun 2016 belum berjalan dengan baik. Berdasarkan temuan di lapangan yang memperlihatkan rendahnya pelayanan di Unit Pelayanan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Banjaran Kota Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut: Tidak memberikan kenyamanan di ruang pelayanan dan ruang tunggu (tidak representatif atau

sempit), Prosedur pelayanan yang diberikan pada pasien tidak memuaskan atau berbelit-belit, Tidak tanggap atas keluhan pasien tentang antrian yang terbatas (melebihi pintu keluar), Penarikan tarif biaya tidak sesuai dengan kualitas layanan yang diberikan. Tidak memberikan kemudahan pelayanan dalam akses pelayanan kesehatan.

Dalam penelitian ini banyak faktor yang mempengaruhinya, namun penulis mencoba mengaplikasikan melalui konsep pengendalian. Karena pengendalian di dalamnya selain terdapat tindakan pengawasan juga terdapat tindakan korektif atau perbaikan. Adapun pengendalian yang dilakukan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Banjaran Kota Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung diaplikasikan melalui pelacak (*detector*), penilai (*assesor*), dan umpan balik (*effector*) sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Banjaran Kota Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung melalui *tangible* (berwujud), *reliability* (keandalan), *responsiveness* (tanggung jawab), *assurance* (jaminan), *emphaty* (perhatian). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Jaminan Kesehatan di Kabupaten Bandung.

## **2. TINJAUAN TEORI**

### **2.1. Pengertian Pengendalian**

Pengendalian menurut Earl P. Strong dalam Hasibuan (2001: 241) bahwa: "Proses pengaturan berbagai faktor dalam perusahaan, agar

pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana". Sejalan dengan itu Harold Koontz dalam Hasibuan (2004: 242) bahwa: "Pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara". Lain halnya konsep yang dideskripsikan oleh Terry (dalam Hasibuan, 2008:24) mengemukakan bahwa: "Pengendalian adalah suatu proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dan standar.

Demikian pula Suadi (2001: 3) mengemukakan bahwa: "Pengendalian adalah proses untuk membuat sebuah organisasi mencapai tujuannya". Sedangkan Hanafi (1997: 447) mengemukakan bahwa: "Pengendalian adalah usaha sistemik untuk menetapkan standar prestasi tertentu dengan merencanakan mendesain sistem umpan balik informasi, membandingkan prestasi yang sesungguhnya dengan standar prestasi, menentukan apakah terjadi penyimpangan, dan mengukur apakah penyimpangan itu berarti (signifikan), dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua sumberdaya perusahaandigunakan dengan cara yang paling efektif dn efisien untuk mencapai tujuan perusahaan".

Berdasarkan proses-proses pengendalian tersebut di atas, penulis berharap bahwa adanya suatu kegiatan dengan cara membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-

norma atau peraturan maka sudah tentu keberhasilan dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan tidak terlepas dari pengendalian sebagai salah satu unsur yang dilaksanakan secara benar. Di samping karena pengendalian juga merupakan suatu proses maka dalam pelaksanaannya harus berdasarkan urusan-urusan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan dan penilaian sampai dengan tindakan korektif apabila masih terdapat kekurangan atau penyimpangan dari rencana-rencana dan hasil pelaksanaan yang telah ditentukan.

## 2.2 Pengertian Kualitas Pelayanan

Pelayanan adalah merupakan usaha untuk melayani kebutuhan orang lain dengan tujuan untuk memuaskan pelanggan. Pelayanan bukan hanya dapat diberikan oleh instansi pemerintah saja, melainkan juga oleh pihak swasta. Perbedaannya, pelayanan umum yang dijalankan oleh instansi pemerintah bermotif sosial dan politik, sedangkan pelayanan yang dijalankan oleh pihak swasta bermotif ekonomi atau mencari keuntungan.

Selain konsep pelayanan yang telah disebutkan di atas, dikenal juga adanya pelayanan prima, Soetopo, et al (1999:7) menjelaskan pelayanan prima yaitu bahwa "Pelayanan prima merupakan terjemahan *excellent service* yang secara harfiah berarti pelayanan pelayanan yang sangat baik/pelayanan yang terbaik. Pelayanan sebagai usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan orang lain, terkait dengan kualitas yaitu kualitas pelayanan. Kata "kualitas" memiliki banyak definisi yang

beragam mulai dari yang konvensional hingga yang strategis.

Demikian pula yang disampaikan menurut Wyckof dalam Lovelock ( yang dikutip dari Purnama ,2006 : 19-20 ) memberikan pengertian kualitas layanan sebagai tingkat kesempurnaan tersebut untuk memenuhi keinginan konsumen, sedangkan menurut Parasuraman, et al. Kualitas layanan merupakan perbandingan antara layanan yang dirasakan ( persepsi ) konsumen dengan kualitas layanan yang diharapkan konsumen. Jika kualitas layanan yang dirasakan sama atau melebihi kualitas layanan yang diharapkan, maka layanan dikatakan berkualitas dan memuaskan.

Dari definisi-definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan pelayanan yang dapat memenuhi keinginan konsumen/pelanggan yang diberikan oleh suatu organisasi. Kualitas pelayanan diukur dengan lima indikator pelayanan (keandalan, daya tanggap, kepastian, empati, dan bukti fisik).

## 3. METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang ada, karakteristik masalah yang diteliti dalam penelitian ini dapat diklarifikasi sebagai *explanatory research* yaitu penelitian yang menjelaskan hubungan kausal dan menguji keterkaitan antara variabel melalui pengujian hipotesis atau penelitian penjelasan (Singarimbun dan Effendi, 1995:256). Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengujian hipotesis

yang menguji pengaruh di antara variabel yang diteliti (Sugiyono, 2001:11)

#### **4. PEMBAHASAN**

##### **4.1 Kesimpulan Statistik**

Berdasarkan hasil perhitungan uji-t dan gambar di atas, maka dapat diketahui bahwa nilai t hitung berada dalam daerah penerimaan  $H_0$ , dengan demikian dapat dinyatakan bahwa dengan taraf signifikansi sebesar 5% atau dengan taraf kepercayaan 95% diperoleh kesimpulan terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengendalian yang dilakukan oleh Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung terhadap Kuaalitas Pelayanan Kesehatan Dasar.

Hasil perhitungan Korelasi memperlihatkan bahwa terdapat korelasi diantara kedua variabel Pengendalian yang dilakukan oleh Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung (X) dengan variabe Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar (Y) dengan diketahui bahwa t hitung sebesar 8,1184 dengan  $\alpha=0,05$  dan  $df=60$  maka t tabel  $t\text{-tabel} = -1,6612$ . Hasilnya digambarkan atau diilustrasikan dalam gambar distribusi normal (distribusi t) atau berbentuk kurva distribusi t, artinya bahwa hipotesis yang menyatakan adanya Pengaruh Pengendalian oleh Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung terhadap Kualitan Pelayanan Kesehatan Dasar yang ditentukan oleh dimensi pelacak (*detector*), penilai (*assesor*), dan umpan balik (*effector*) dapat diterima secara empirik atau  $H_1$  diterima  $H_0$  ditolak.

#### **5. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **5.1. Simpulan**

Dari hasil pengolahan data, analisis data dan pembahasan yang telah

dilakukan pada bab IV, Berdasarkan hasil pengukuran terhadap kedua variabel penelitian ternyata Pengendalian yang dilakukan Pusat Kesehatan Masyarakat Banjaran Kota Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung yang diaplikasikan melalui pelacak (*detector*), pdenilai (*assesor*), dan umpan balik (*effector*) berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung. Dengan demikian,  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, atau dengan kata lain penelitian ini dapat teruji secara empirik.

##### **5.2. Saran-Saran**

###### **5.2.1. Saran Teoritis**

Hasil penelitian ini secara teoritis disarankan untuk dilakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan atau teori – teori lain sebagai varibel penelitian, sehingga hasilnya dapat lebih komprehesif dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan khususnya mengenai kualitas pelayanan untuk keperluan sosial, khususnya untuk penelitian dan kajian lanjutan penulis.

###### **5.2.2. Saran Praktis**

Pusat Kesehatan Masyarakat Banjaran Kota Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung dapat menjalankan tugasnya secara profesional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi), wewenang dan tanggung jawab masing-masing, selanjutnya dapat memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang lingkungan yang sehat kepada masyarakat dengan pelayanan bidang kesehatan secara paripurna dan dapat memberikan pelayanan dengan mutu sebaik-baiknya sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk meningkatkan mutu pelayanan



kesehatan sesuai dengan harapan masyarakat dan kode etik pelayanan medik yang di ikuti dengan antusiasme masyarakat kecamatan banjaran untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ivancevich, John, M, Konopaske, Robert, and T. Matteson, Michael. 2005.. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. Jilid Satu. Terjemahan : Nunuk Ardiani. Jakarta : PN Erlangga.
- Jajat (Dalam Sedarmayanti). 1999. *Pelayanan Publik*. Jakarta: PN Erlangga
- Katz, Saul M. 1985. *A System Approach to Development Administration*.. Washington DC : ASPA.
- Kennedy & Yong Dalam Supranto. 1997. *Manajemen Pembangunan* Jakarta: Gunung Agung
- Kotler, Philip, and Garry amstrong., 1985. *Principles of Marketing*, 6 th ed. Englewood Cliffs, N.J. Prenticehall International, Inc..
- Kurniawan, Agung, 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Pembaruan.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3S.
- Moenir, H.A.S. 2001. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia* Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution. 2004. *Prospek Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: PN. Gunung Agung
- Nazir, Mohammad 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nawawi, Handari. 2000. *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Ndraha, Talizidhuhu. 1996. *Peranan Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Desa*. Jakarta : Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Oentarto. 2001 . *Manajemen Perkotaan : Aktor, Organisasi, dan Pengelolaan Daerah Perkotaan di Indonesia*. Yogyakarta: Lingkaran Bangsa.
- Parasuraman dalam Vincent Gaspertsz. 2005. *Sebuah Model Dalam Pelayanan Publik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Panuju, Redi. 1999. *Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Poerwadarminta. 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Parasuraman, A., et all. 1985. *A conceptual Model of Service Quality and its Implications for Future Research*, Jurnal of Marketing, vol.49 (fall), pp.
- Pamudji, S. 1994. *Ekologi Administrasi Negara*. Jakarta: Yayasan Karya Dharma IIP.
- Rasyid, M. Ryaas. 1997. *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru*. Jakarta: Yasif Watampone.
- Robbins, Stephen P. 1995. *Jusuf Udaya Lic., Inc (Ab). Teori Organisasi, Struktur, Desain dan Aplikasi*. Edisi 3 . Jakarta : Arcan.

- \_\_\_\_\_.2003. *Perilaku Organisasi*. Jilid I. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Saefullah, A. Djadja. 1999. *Konsep dan Metode Pelayanan Umum*. Publik: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Bandung: FISIP UNPAD PRESS.
- Sedarmayanti,. 2012. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik).Bagian Kedua. Membangun Sistem Kinerja Guna meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance*.Bandung: Mandar Maju.
- Sevilla, Consuelo G, at.all. 1993. *Pengantar Metode Penelitian*. Penerjemah Alimuddin Tuwu. Jakarta : PN UI Press..
- Siagian, Sondang P. 1984. *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional* . Jakarta : Gunung Agung.
- \_\_\_\_\_. 1995. *Path Analisis*. Bandung : Jurusan Statistika FMIPA UNPAD.
- Singarimbun, Masri, dan Efendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3LS
- Sitepu, Nirwana. 1994. *Analisis.Jalur (Path Analysis)* Bandung: Unit pelayanan Statistika. FMIPA: Universitas Padjadjaran
- Sudjana. 1993. *Teknik Analisis Regresi dan Korelasi*. Bandung : Tarsito.
- Soedjatmoko. 1995. *Dimensi Manusia Dalam Pembangunan*. Jakarta : Pustaka LP3 ES Indonesia.
- Soejamto. 1990. *Beberapa Pengertian di Bidang pengawasan*.Jakarta: Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_.2001. *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Singarimbun, Masri dan Soffian Effendi (Ed). 1989. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta : LP3ES.
- Stoner, Janes A.F., Freeman, R. Edward. 1996. *Manajemen*. (Alih Bahasa Sindoro). Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Sugiarto. 2002. *Administrasi Dalam Kepemimpinan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 1994. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung. Alfabeta.
- Suadi, Arief. 2001. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jogjakarta: BPFE.
- Surakhmad, Winarno. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Tehnik*, Bandung : Tarsito.
- Syafie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : Refika Aditama.
- Terry, G.R. 2001. *Principles of Management*. Third Edition. Illionis : Richard D.Irwin, Inc.
- \_\_\_\_\_.2008. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Thoha, Miftah. 1984. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: PT Raya GrafindoPersada.
- Tjokroamidjoyo, Bintoro. 1995. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta : UT.
- Travers dalam Sevilla.1993. *Pengantar Metode Penelitian*. Alih Bahasa: Alimudin Tuwu. Jakarta Universitas Indonesia.

- Triguno. 1997. *Manajemen Pembangunan*. Jakarta: Haji Masagung
- Wasistiono, Sadu, dan M.Irwan Tahir. 2001. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*. Jakarta : PN Fokus Media.
- Zeithml, Valarie A., A Prarasurahman, and leonard L. Berry. 1990, *Delivering Quality Service*. New York: The Free Press.
- B. Sumber-Sumber Lain :**
- Republik Indonesia. 1945. *Undang-undang Dasar 1945*. Jakarta : Sekretariat Negara RI.
- \_\_\_\_\_.1992. *Undang-undang Kesehatan* Nomor 23 Tahun 1992. Jakarta: Menteri Kesehatan RI.
- \_\_\_\_\_.2009. *Undang-undang Kesehatan* Nomor 36 Tahun 2009. Jakarta: Menteri Kesehatan RI.
- Propinsi Jawa Barat. 2014. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2014 Tentang *Jaminan Kesehatan di Kabupaten Bandung* pada Pasal 1 Ayat 13 s.d. 16 dan Pasal 23 Ayat 1.
- \_\_\_\_\_. 2012. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 20 Tahun 2012 Tentang *Pembentukan Organisasi Daerah* Paragraf 3 Pasal 9.
- \_\_\_\_\_. 2002. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2002 Tentang *Pembentukan Organisasi Daerah Dinas Kabupaten Bandung*.